

## PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI SMKN 1 PANGANDARAN

Dela Zahara<sup>1\*</sup>, Ai Siska Silvia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana di SMKN 1 Pangandaran, dengan fokus pada pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah berperan aktif dalam setiap tahap pengelolaan sarana dan prasarana, mulai dari perencanaan hingga penghapusan barang. Peran komite sekolah mencakup empat fungsi utama, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antara sekolah dan masyarakat. Meskipun telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, komite sekolah masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan lahan dan pendanaan. Meskipun demikian, pengelolaan sarana dan prasarana di SMKN 1 Pangandaran menunjukkan hasil yang memadai dengan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan pengadaan yang berbasis kebutuhan dan prioritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran komite sekolah sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan kualitas sarana dan prasarana, yang pada gilirannya mendukung mutu pendidikan di sekolah.

**Kata Kunci:** Komite Sekolah, Sarana dan Prasarana, Manajemen.

### Abstract.

*This study aims to analyze the role of the school committee in the management of facilities and infrastructure at SMKN 1 Pangandaran, focusing on the procurement, maintenance, and disposal of educational facilities. The approach used is qualitative with a case study research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed inductively. The results show that the school committee plays an active role in every stage of managing facilities and infrastructure, from planning to disposal. The committee's role includes four main functions: as an advisor, supporter, controller, and mediator between the school and the community. Although the committee has carried out its duties effectively, it still faces several challenges, such as limited land and funding. Nevertheless, the management of facilities and infrastructure at SMKN 1 Pangandaran shows satisfactory results with routine maintenance and procurement based on needs and priorities. This study concludes that the role of the school committee is crucial in ensuring the smooth operation and sustainability of the quality of facilities and infrastructure, which in turn supports the quality of education at the school.*

**Keywords:** School Committee, Facilities and Infrastructure, Management.

## **1. Pendahuluan**

Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang dirancang untuk membekali individu dengan keterampilan dan kemampuan yang relevan agar dapat bekerja dalam suatu kelompok atau bidang pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, pendidikan kejuruan perlu mengembangkan program pengajaran yang didasarkan pada analisis kebutuhan kerja yang relevan bagi peserta didik. Pendidikan kejuruan bertujuan mempersiapkan peserta didik agar siap memasuki dunia kerja sekaligus membentuk sikap profesional sebagai tenaga kerja tingkat menengah di sektor usaha maupun industri. Oleh karena itu, program-program pendidikan yang diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus dirancang sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan yang tersedia di dunia kerja.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bagian dari pendidikan menengah berbasis kejuruan merupakan salah satu subsistem dalam Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki peran penting dalam mencetak tenaga kerja terampil di tingkat nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan SMK, yaitu mengembangkan kecerdasan, wawasan, kepribadian, moralitas, serta keterampilan untuk hidup mandiri sekaligus mempersiapkan peserta didik melanjutkan pendidikan yang relevan dengan bidang keahliannya (PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 26 Ayat 3). Sebagai institusi pendidikan, SMK memegang peranan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Untuk menghadapi tantangan di era globalisasi, lulusan SMK setidaknya perlu memiliki sejumlah kompetensi, meliputi pemahaman teori, keterampilan praktis, sikap profesional, kemampuan personal, dan kompetensi sosial (Zamtinah, 2000, hlm. 209).

Oleh sebab itu, tenaga kerja Indonesia perlu memiliki kualitas sumber daya manusia dengan karakteristik kompetensi inti yang sangat diperlukan untuk bersaing memperebutkan peluang kerja. Kompetensi ini diwujudkan melalui berbagai program pendidikan yang dirancang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Proses pembelajaran di SMK harus memberikan peserta didik pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kementerian Pendidikan Nasional, melalui Direktorat Pembinaan SMK, telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2010–2014. Dokumen ini memuat kerangka dan arah pengembangan pendidikan kejuruan yang bertujuan membentuk manusia kreatif, inovatif, sportif, dan berjiwa wirausaha. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar menjadi lebih baik, efektif, dan efisien (Garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2012).

Tantangan yang muncul dari upaya tersebut adalah adanya dilema. Di satu sisi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut untuk responsif terhadap kebutuhan dunia kerja, namun di

sisi lain, SMK menghadapi kebutuhan investasi yang besar. Hal ini disebabkan oleh perlunya fasilitas praktik, seperti gedung, mesin-mesin, peralatan, serta sarana pendukung lainnya, yang memerlukan biaya operasional tinggi. Keberhasilan program pendidikan di SMK, khususnya melalui kegiatan belajar mengajar, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penting adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan (PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 42 Ayat 1 dan 2).

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan elemen penting yang keberadaannya sangat diperlukan dalam mendukung proses pendidikan. Menurut Ary H. Gunawan (2002, hlm. 116), pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan mencakup berbagai aktivitas, seperti perencanaan, penilaian awal, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengendalian. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kurangnya kemampuan guru dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan teori maupun praktik yang semestinya.

Masalah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan juga dialami oleh SMK Negeri 1 Pangandaran. Sekolah ini merupakan salah satu institusi kejuruan yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan mencetak lulusan yang mandiri dan profesional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Selain itu, sekolah ini berupaya meningkatkan kinerja untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kreatif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era globalisasi, sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.

Pentingnya sarana dan prasarana di sekolah telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 45 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut menyebutkan bahwa *"Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, intelektual, sosial, emosional, serta kejiwaan peserta didik"*. Namun, kenyataannya banyak sekolah atau lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi dan mengembangkan sarana serta prasarana pendidikan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, jumlah sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan rasio siswa dan guru, serta adanya fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Akibatnya, banyak fasilitas yang hanya tersimpan di gudang, sehingga berisiko rusak

seiring waktu. Selain itu, tidak jarang ditemukan sarana yang disediakan dengan biaya tinggi tetapi belum menjadi prioritas kebutuhan sekolah.

Untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan mendalami manajemen sarana dan prasarana sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Penelitian ini difokuskan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mengingat SMK memiliki berbagai konsentrasi keahlian atau jurusan yang tentunya dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang keahlian. Untuk memperjelas cakupan penelitian, penulis memilih SMK Negeri 1 Pangandaran sebagai objek penelitian. SMK ini memiliki jumlah siswa yang cukup besar, yang mencerminkan keberadaan sarana dan prasarana yang beragam untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menjadikan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di SMK Negeri 1 Pangandaran sebagai fokus utama penelitian dengan judul *"Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Pangandaran."*

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan data dikumpulkan melalui teknik triangulasi (gabungan metode), dianalisis secara induktif atau kualitatif, serta hasil penelitian lebih menekankan pemahaman makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan tujuan untuk lebih terfokus pada masalah yang menjadi objek kajian. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Creswell (1998), sebagaimana dikutip oleh Rukin (2021), menjelaskan bahwa penelitian dapat disebut studi kasus apabila prosesnya dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus tertentu, serta mengikuti kerangka kerja yang sesuai dengan struktur penelitian studi kasus.

Partisipan dalam penelitian ini merupakan sumber data dengan penentuan sampel yaitu orang-orang yang terlibat langsung atau berpartisipasi aktif serta dianggap memahami hal-hal yang terkait dengan manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan SMK

Negeri 1 Pangandaran. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Pangandaran pada bulan November 2024.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Manajemen sarana dan prasarana, yang meliputi proses pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan, menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kasihan, menerapkan manajemen berbasis standar. Pelaksanaan manajemennya juga mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berpedoman pada prinsip “apa yang ditulis harus dikerjakan, dan apa yang dikerjakan harus sesuai dengan yang ditulis” (Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, pada 20 November 2024). Manajemen berbasis standar yang diterapkan oleh kepala sekolah ini didukung oleh dokumen berupa Bukti Fisik Sasaran Mutu dan Dokumen Sistem Manajemen Mutu WKS di bidang Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan ISO 9001:2008.

Dari hasil wawancara sebanyak 91% sarana dan prasarana telah dimanfaatkan secara optimal dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar, sementara 76% fasilitas berada dalam kondisi baik. Selain itu, 94% tenaga pendidik telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1 untuk mendukung program sertifikasi guru, dan tingkat kehadiran tenaga pendidik mencapai 97% setiap bulannya.

Penerapan manajemen standar terlihat dari hasil rekapitulasi persentase inventarisasi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar praktik, yang menunjukkan bahwa 88% fasilitas berada dalam kondisi baik. Selain itu, rekapitulasi persentase keseluruhan sarana dan prasarana mencatat 78% dalam kondisi baik. Persentase ini mengindikasikan bahwa manajemen di SMK Negeri 1 Pangandaran telah memenuhi standar, dengan kondisi sarana dan prasarana yang terjaga baik. Hal ini didukung oleh pelaksanaan rencana pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh WKS Bidang Sarana dan Prasarana.

#### **Pengadaan Sarana dan Prasarana**

Proses pengadaan sarana dan prasarana di sekolah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan program sekolah, menggantikan barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, SMK Negeri 1 Kasihan melaksanakan pengadaan tersebut dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan, karena setiap langkahnya harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Sekolah.

Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh WKS Bidang Sarana dan Prasarana dengan menerima masukan dari koordinator di masing-masing unit terkait kebutuhan

mereka. Sebelum keputusan diambil, kebutuhan tersebut terlebih dahulu didiskusikan dalam sebuah perencanaan bersama untuk memastikan relevansi dan prioritasnya.

### **Proses Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana**

Menurut WKS Bidang Sarana dan Prasarana, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara, pengadaan sarana dan prasarana dilakukan jika terdapat peralatan yang rusak atau berdasarkan usulan dari guru. Usulan ini diajukan melalui koordinator masing-masing unit dalam rapat evaluasi akhir tahun pelajaran. Sebelum keputusan pengadaan diambil, dilakukan analisis kebutuhan peralatan pembelajaran untuk satu tahun mendatang guna memastikan relevansi dan urgensinya. Setelah perencanaan selesai, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang telah direncanakan. Berikut adalah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk SMK Negeri 1 Pangandaran pada tahun ajaran 2024/2025.

Setelah barang diperoleh melalui proses pengadaan, langkah berikutnya adalah pemeliharaan untuk memastikan sarana dan prasarana dapat digunakan secara optimal. WKS Bidang Sarana dan Prasarana mencatat setiap barang yang diterima dalam buku penerimaan, memberikan kode pada barang melalui KIB (Kartu Inventaris Barang), dan menyusun laporan triwulanan terkait administrasi pengadaan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan melalui tiga metode: pemeliharaan harian, pemeliharaan berkala, serta tindakan preventif untuk mencegah kerusakan. Hingga saat ini, penghapusan barang belum pernah dilakukan, namun barang yang sudah tidak dapat digunakan atau tidak lagi mendukung proses pembelajaran dihapus atau disingkirkan. Penghapusan dilakukan pada barang-barang yang rusak parah, seperti pecah atau tidak layak pakai, dengan mengikuti prosedur pencatatan di buku inventaris barang rusak. Proses ini kemudian dilaporkan kepada WKS Bidang Sarana dan Prasarana untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Sarana dan fasilitas pendukung di sekolah merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan. Sarana pendidikan mencakup berbagai perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, seperti meja, kursi, papan tulis, buku, dan sebagainya, yang berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, prasarana pendidikan mengacu pada berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran proses pembelajaran, seperti lapangan olahraga, gedung sekolah, dan lainnya. Kedua aspek ini saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu guru dalam mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dengan fasilitas yang lengkap, suasana pembelajaran menjadi lebih menarik, mendorong siswa untuk lebih aktif, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Jumlah ruang kelas yang cukup, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas penunjang lainnya harus disesuaikan dengan jumlah siswa dan memenuhi rasio yang sesuai. Pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai jumlah maksimal siswa dalam satu kelas, yang menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menentukan kebijakan terkait jumlah penerimaan siswa baru, yang harus disesuaikan dengan kapasitas ruang kelas yang tersedia.

SMK Negeri 1 Pangandaran didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan harapan terkait lulusan yang siap bekerja, terutama di Kecamatan Sambas dan Kabupaten Sambas secara umum. Dengan usia yang sudah cukup matang, SMK Negeri 1 Pangandaran berhasil meyakinkan masyarakat Kabupaten Sambas, terbukti dengan meningkatnya jumlah lulusan SMP yang memilih melanjutkan pendidikan di sekolah ini. Keberhasilan ini tidak lepas dari keberadaan fasilitas yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran.

Sekolah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas praktik yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Selain itu, SMK Negeri 1 Pangandaran juga menyediakan fasilitas pendukung untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, seperti peralatan musik, lapangan olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan lainnya. Sarana penunjang lainnya termasuk ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, toilet yang bersih, suasana sekolah yang asri dengan tanaman hijau, serta lingkungan yang terjaga kebersihannya. SMK Negeri 1 Pangandara juga menyediakan ruang *virtual reality (VR)*, di mana siswa dapat belajar dengan simulasi yang memberikan pengalaman seolah-olah berada di dalam kapal yang sedang berlayar.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Pangandaran sangat mendukung kelancaran proses pembelajaran, baik yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Fasilitas yang lengkap ini juga memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Selain itu, siswa terdorong untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri mereka, sehingga dapat bersaing dan meraih prestasi serta memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar lulusan yang diharapkan.

Manajemen sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Pangandaran telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari inventarisasi, pengadaan, hingga penghapusan aset. Pengelolaan sarana dan fasilitas yang efisien ini mendukung kelancaran pembelajaran di sekolah tersebut. Semua ini berjalan seiring dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesiapan lulusan yang siap bekerja dan memenuhi standar industri.

Untuk mendukung kemajuan pendidikan dalam hal sarana dan prasarana, pemerintah memberikan dana kepada sekolah-sekolah yang dikelola oleh pihak sekolah dan komite sekolah. Namun, hal ini juga memunculkan kecenderungan kepala sekolah lebih fokus pada proyek-proyek pengelolaan dana dibandingkan dengan tugas utamanya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan kepala sekolah dapat menjaga fokus dan tidak kehilangan arah dalam mewujudkan visi dan misi, khususnya dalam mengelola pengembangan sarana dan prasarana di sekolah. Sebagai pemimpin puncak di lingkungan sekolah, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Pengawasan dan pengendalian menjadi bagian dari proses yang berkelanjutan, yaitu dengan memantau pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun dan melakukan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan dalam pengembangan sarana dan prasarana.

Untuk melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya standar kinerja yang jelas. Pengawasan dan pengendalian berfungsi sebagai alat ukur untuk memastikan apakah implementasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Pengendalian ini mengacu pada aspek pemanfaatan, kualitas, kuantitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pengembangan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Kemampuan profesional kepala sekolah perlu terus dikembangkan melalui peningkatan keterampilan aparat sekolah dalam mengelola, menganalisis, mengembangkan, dan memanfaatkan sarana prasarana secara efektif dan efisien. Untuk mendukung hal ini, penting untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang berkualitas, guna meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana di SMKN 1 Pangandaran telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:



1. Secara keseluruhan, peran kepala sekolah dalam mengembangkan sarana dan prasarana di SMKN 1 Pangandaran cukup efektif. Dalam aktivitas sehari-hari, kepala sekolah menunjukkan sikap yang mendukung kemajuan lembaga pendidikan, khususnya di SMKN 1 Pangandaran.
2. Peningkatan prestasi belajar yang seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana di sekolah.
3. Kepala sekolah berhasil memberikan kontribusi pada kemajuan sekolah melalui pengembangan sarana dan prasarana yang ada.
4. Kepala sekolah juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik lebih memahami dan menguasai penggunaan alat-alat yang mendukung perkembangan sarana dan prasarana di sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah di SMKN 1 Pangandaran telah menjalankan perannya dengan baik, meliputi empat fungsi utama: (1) Sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*), (2) Pendukung (*supporting agency*), (3) Pengontrol (*controlling agency*), dan (4) Mediator antara sekolah dan masyarakat dalam proses pengadaan sarana dan prasarana. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan terlihat dalam kontribusinya dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, di mana mereka sering memberikan saran dan masukan selama rapat perencanaan pengadaan. Mereka juga memberikan rekomendasi terkait cara-cara yang akan ditempuh dalam pengadaan sarana dan prasarana, hingga pada proses penghapusan barang-barang yang sudah tidak diperlukan.

Dengan demikian, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan telah dilaksanakan dengan baik. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Pantjastuti (2008: 81) yang menyatakan bahwa idealnya, sekolah dan yayasan pendidikan harus melibatkan komite sekolah dalam merumuskan program, kegiatan, serta visi, misi, dan tujuan sekolah, terutama di sekolah swasta dengan ciri khas tertentu. Dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, keterlibatan komite sekolah sangat penting untuk memperkuat keputusan yang diambil, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barnawi (2012: 51) yang menegaskan bahwa perencanaan sarana dan prasarana pendidikan seharusnya melibatkan unsur-unsur penting di sekolah, termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, kepala tata usaha, bendahara, dan komite sekolah.

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*Supporting agency*) terlihat dalam keterlibatannya sebagai panitia dalam proses pengadaan sarana dan prasarana. Komite sekolah

juga aktif dalam menggalang dana dari orang tua wali murid serta memberikan dukungan berupa tenaga, pemikiran, motivasi, dan masukan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dukungan yang diberikan oleh komite sekolah ini juga mencakup tahap penghapusan, di mana mereka turut serta dalam memilih barang dan memeriksa kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah telah menjalankan perannya sebagai badan pendukung dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan tugas yang seharusnya dilaksanakan.

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*) ini diperkuat oleh pernyataan Pantjastuti (2008: 82), yang menyebutkan bahwa komite sekolah berfungsi sebagai badan yang memberikan dukungan berupa dana, tenaga, dan pemikiran. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 Ayat 1 juga menegaskan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, termasuk dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana yang dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas sekolah. Mereka turut terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) bersama kepala sekolah dan guru. Bentuk pengawasan yang diberikan oleh komite sekolah antara lain adalah dengan melakukan survei langsung ke sekolah untuk memeriksa kondisi sarana dan prasarana yang ada. Dalam hal penghapusan sarana dan prasarana, komite sekolah juga ikut serta dalam proses pemilihan barang yang sudah tidak layak pakai serta hadir dalam tahap penghapusan. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah telah menjalankan perannya dengan baik sebagai badan pengontrol. Pernyataan ini didukung oleh Pantjastuti (2008: 82) yang mengemukakan bahwa komite sekolah berfungsi sebagai *controlling agency* yang melakukan pengawasan sosial terhadap sekolah. Pengawasan sosial ini lebih mengarah pada tindakan preventif, seperti ketika sekolah menyusun RKAS atau laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Komite sekolah, dalam menjalankan perannya sebagai mediator, bertugas menyampaikan aspirasi dari masyarakat terkait program sekolah. Dalam konteks pengadaan sarana dan prasarana, komite sekolah berfungsi sebagai penghubung antara pihak sekolah dan masyarakat, menyampaikan usulan dan masukan selama proses perencanaan hingga tahap

pelaporan terkait penghapusan sarana dan prasarana. Dengan demikian, komite sekolah tidak hanya menyalurkan materi atau dana dari masyarakat ke sekolah, tetapi juga ide dan gagasan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hasbullah (2007: 93) yang menyatakan bahwa komite sekolah berperan dalam menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Pernyataan ini juga sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa komite sekolah dibentuk untuk: (1) Menampung dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam merumuskan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah telah melaksanakan perannya dengan baik sebagai mediator dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Dari pembahasan tersebut, terlihat bahwa peran komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana di SMKN 1 Pangandaran telah dilaksanakan dengan maksimal, mulai dari tahap perencanaan hingga penghapusan. Namun, untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada, komite sekolah masih menghadapi beberapa kesulitan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan yang mempengaruhi kemampuan sekolah dalam menambah fasilitas yang diperlukan. Selain itu, masalah pendanaan juga menjadi hambatan, karena sebagian besar orang tua murid di sekolah ini berasal dari golongan menengah ke bawah, sehingga menyulitkan komite sekolah dalam menggalang dana untuk pembangunan fasilitas sekolah yang lebih lengkap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengadaan sarana dan prasarana, setiap warga sekolah memiliki kewajiban untuk menganalisis kebutuhan yang diperlukan, dengan tetap melakukan musyawarah bersama WKS Bidang Sarana dan Prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana di SMK N 1 Pangandaran dilakukan berdasarkan ukuran waktu dan kondisi barang. Pemeliharaan ini dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas sarana tersebut, atau dengan memanggil teknisi atau membawa barang yang membutuhkan perbaikan ke bengkel servis. Sedangkan dalam penghapusan sarana dan prasarana, WKS Bidang Sarana dan Prasarana harus memastikan bahwa penghapusan barang tidak mengganggu kelancaran kegiatan sehari-hari, dan perlu dipertimbangkan penggantinya agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar.

#### 4. Simpulan

Manajemen sarana dan prasarana di SMKN 1 Pangandaran telah dilaksanakan dengan efektif, mengikuti pendekatan manajemen berbasis standar yang mencakup pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Komite sekolah berperan penting dalam setiap tahap proses ini, menjalankan empat fungsi utamanya sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antara sekolah dan masyarakat. Proses pengadaan dilakukan melalui perencanaan yang cermat untuk memastikan relevansi dan prioritas fasilitas, sementara pemeliharaan dilakukan secara rutin dengan metode harian, berkala, dan preventif untuk memastikan kelangsungan sarana dan prasarana. Meskipun demikian, sekolah menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan dan kendala pendanaan, yang memengaruhi kemampuan untuk memperluas dan memperbarui fasilitas. Komite sekolah berkontribusi dengan memberikan dukungan dan membantu penggalangan dana, meskipun keterbatasan ekonomi masyarakat masih menjadi hambatan. Keterlibatan komite dalam perencanaan hingga penghapusan sarana dan prasarana telah memperkuat seluruh proses, memastikan alokasi dana dan pemeliharaan fasilitas dilakukan dengan baik, yang berdampak pada kualitas pendidikan di sekolah. Namun, untuk mencapai peningkatan lebih lanjut, diperlukan upaya lebih untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keberlanjutan fasilitas sekolah agar menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik.

#### 5. Referensi

- Ali, Hilmy Farhani, Galang Pratama Sudiar, Dede Mulyana, and Dea Anggriani. "Manajemen Pengembangan Mutu Pendidikan Karakter dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Sosiologi." *Literasi: Journal of Innovation Literacy Studies* 1, no. 1 (2024): 20-31.
- Bafadal, Ibrahim. (2004). Manajemen perlengkapan sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Barnawi, Mohammad Arifin. (2012). Buku Pintar Mengelola Sekolah (Swasta), Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Bush, T. & Coleman, M. (2000). Leadership and strategic management in education, (terjemahan oleh Fathuroji). Yogyakarta: IRCisoD.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan: Jakarta : Persekolahan Berbasis Sekolah.
- Depdiknas. (2003). Undang-undang RI no. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional.
- Dewi, C., Destrio, W., dan Pura, D. (2021). Management of Physical Education Facilities and

- Infrastructure. Journal of Educational Technology. Vol 5 No. 2. PP. 291-297. Doi : <http://dx.doi.org/10.23887/jet.v5i2.34450>
- Gunawan, Ary. H. (1996). Administrasi sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hasbullah. (2007). Otonomi Pendidikan (Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2001). Educational administration. Theory, research, and practice. Sixth Edition. Library of Congress Catalog-in-Publication Data.
- Mulyana, Dede, Galang Pratama Sudiar, and Hilmy Farhani Ali. "Analisis Perubahan Sosial Dan Pembangunan Di Mts Ypak Cigugur: Tinjauan Terhadap Peran Lembaga Pendidikan Dalam Transformasi Sosial Masyarakat." *J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah* 2, no. 2 (2023): 185-198.
- Rosnaini. 2019. Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan. Jurnal Inspirasi Pendidikan. Vol. VIII. No. 1. Doi : <https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.10226>
- Rue, L.W. & Byars, L.L. (2000). Management: Skill and application. (8th ed.). Boston: Irwin McGraw-Hill.
- Salim. (2001). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif (edisi kedua, Agustus 2006), Tiara
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.
- Susanto, R., Rohiat, dan Djuwita, P.(2017). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Di SMK. Jurnal Manajer Pendidikan. Vol. 11 No. 6. <https://ejournal.unib.ac.id/>
- Terry, R.G. (1977). Principles of management. Seventh Edition. Illionis: Richard D. Irwin Inc.
- Undang-Undang (1945) Versi Amandemen. Tentang tujuan pendidikan nasional. Bandung: Fokus Media
- Usman, Husaini. (2010). Manajemen: teori, praktek dan riset pendidikan (Edisi 3). Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudin, U. R. (2020). Buku Manajemen Pendidikan (Teori Dan Praktik Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional). Yogyakarta: Deepublish
- Wuradji, (2006). Panduan penelitian survei. Yogyakarta: Lembaga Penelitian. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Zamtinah, (2000). Kompetensi standar lulusan SMK yang dibutuhkan inIdustri. Jurnal Pendidikan, Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Yogyakarta, 209, 0125-992X

